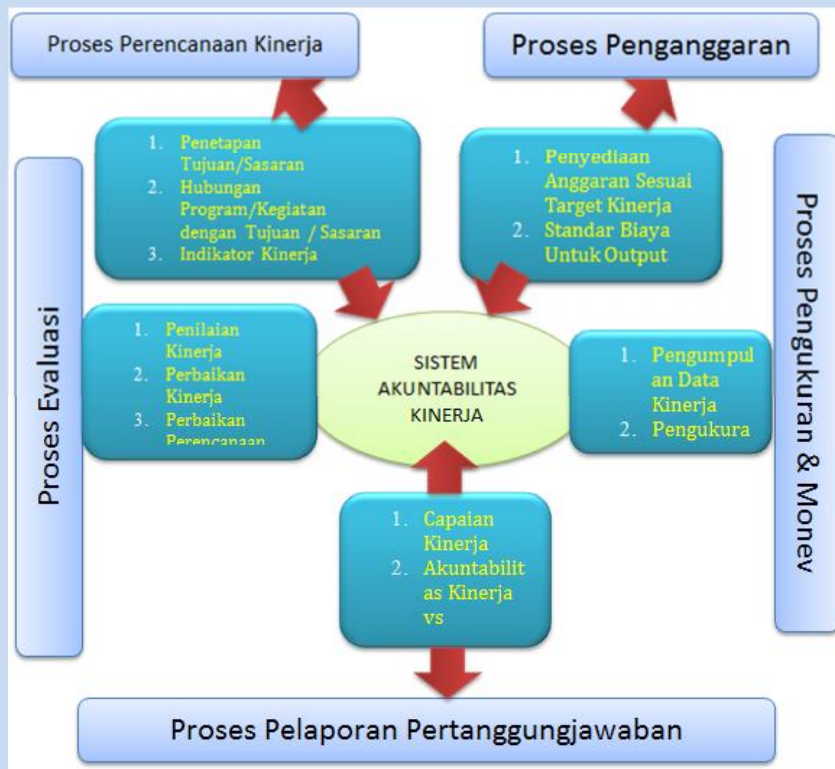




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2014



2015



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

KATAPENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat Nya, kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 ini guna memenuhi kewajiban manajemen pemerintah yang dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan LAKIP dan Tapkin.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin adalah suatu perwujudan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan gambaran pelaksanaan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2014.

Adapun penyusunan serta pelaksanaan program kegiatan tersebut tentunya tetap mengacu kepada:

1. Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 -2018;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009;
3. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuasin.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Banyuasin di tahun 2014 tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi antar Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta kinerja yang baik dari seluruh staf Inspektorat Kabupaten Banyuasin, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan. Oleh karena, pada masa yang akan datang Inspektorat Kabupaten Banyuasin akan lebih meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi.

Pangkalan Balai, Februari 2015

INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak.,CA

PEMBINA TK. I

NIP. 19651023 198703 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Banyuwangi secara periodik keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan inspeksi kearah perbaikan dengan berlandaskan kepada visi, misi dan sasaran serta cara mencapai tujuan dari unit kerja yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), harus ditunjang dengan kinerja yang baik pula dari setiap Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu pelaksana di Bidang Pengawasan dituntut untuk dapat melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya.

Pengukuran Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai. Pada tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan 8 (delapan) program yang mencakup 30 (tiga puluh) kegiatan dengan baik dan realisasi anggaran yang telah digunakan sebesar Rp.8.120.621.022,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 90,61 % dari total anggaran yang ada sebesar Rp.8.961.901.595,48,- (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Berdasarkan realisasi keuangan dan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014, maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 dapat dikatakan berhasil.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	1
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Maksud dan Tujuan	4
1.5 Sistematika Pelaporan	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Penetapan Kinerja	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	12
3.2 Akuntabilitas Keuangan	21
3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya	23
BAB IV : PENUTUP	25
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Matrik Rencana Strategis (RENSTRA)	
- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	
- Form Pengukuran Kinerja	
DATA-DATA PENDUKUNG	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Nopember 2005, maka Nomenklatur Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyuwangi diubah menjadi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam bidang pengawasan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 431 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

1.2 Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 431 Tahun 2013 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tugas Pokok yaitu :

“Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa”

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

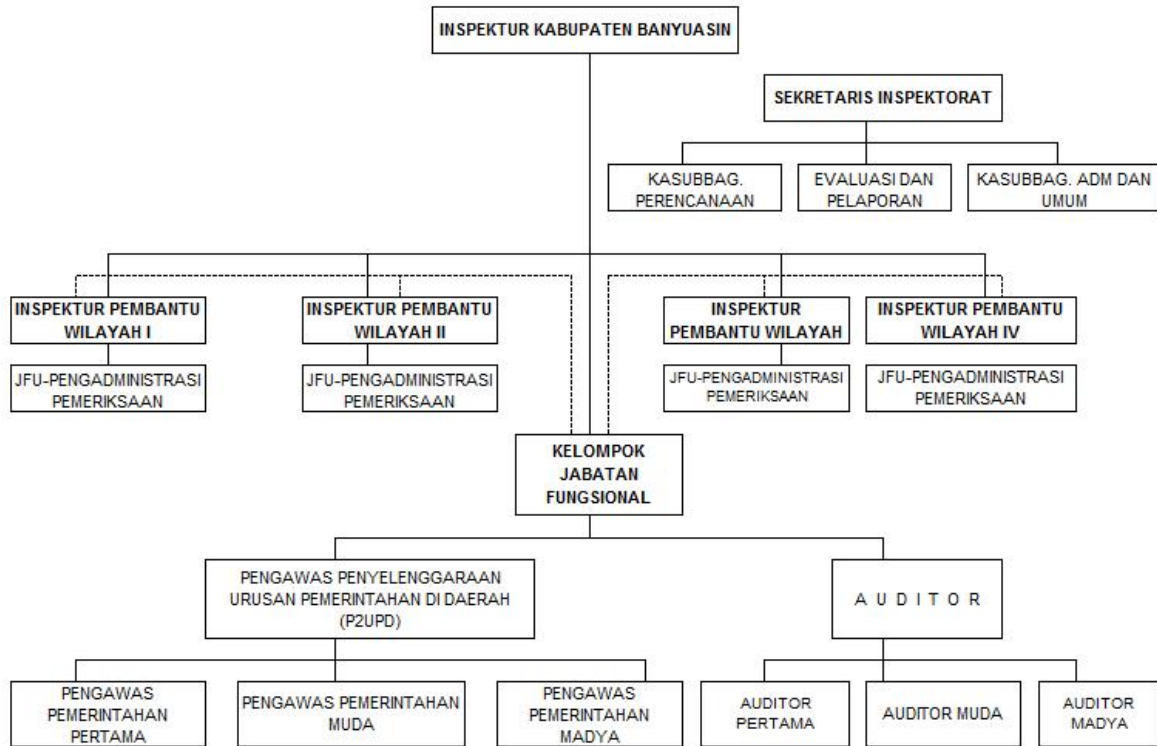
- a. Perencanaan umum program pengawasan;
- b. Perumusan kebijaksanaan dan fasilitas pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi yang telah dibebankan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi memiliki Struktur Organisasi sebagaimana dapat dilihat pada diagram berikut ini :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

Bagan 1.1 STRUKTUR ORGANISASI



1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Esselon

Uraian	Jumlah Pegawai (orang)
Esselon II	1 orang
Esselon III	5 orang
Esselon IV	2 orang
Jumlah	8 Orang

2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Uraian	Jumlah Pegawai (orang)
Golongan IV	12 Orang
Golongan III	29 Orang
Golongan II	3 Orang
Golongan I	0 Orang
Jumlah	44 Orang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

3) Struktur Organisasi Berdasarkan Pendidikan

Uraian	Jumlah Pegawai (orang)
SD/ Sederajat	-
SLTP/ Sederajat	-
SLTA/ Sederajat	2 Orang
DIPLOMA	3 Orang
S.1	30 Orang
S.2	9 Orang
S.3	-
Jumlah	44 Orang

1.3 Isu Strategis

a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat diketahui sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
2. Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
4. Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
5. Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.
6. Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
7. Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2014.
2. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode yang akan datang pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTARISI

IKHTISAR EKSEKUTIF



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

- BAB I** : Pendahuluan menjelaskan secara ringkas Gambaran Umum, Kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, Isu strategis, maksud dan tujuan serta Sistematika Pelaporan LAKIP
- BAB II** : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2014-2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, program dan kegiatan pokok, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014
- BAB III** : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran Kinerja Tahun 2014, Analisis capaian kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Tindak lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya.
- BAB IV** : Penutup menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014, permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- Lampiran Matrik Renstra (RS)
- Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- Lampiran Pengukuran Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Kabupaten Banyuasin mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang memerlukan intergritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur - unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan. Rencana Strategis (Renstra) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi dan Misi

- a. Visi Pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuasin Inspektorat Kabupaten Banyuasin memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang, mengacu pada arahan RPJMD Banyuasin Tahun 2014, maka Visi Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 adalah:

“Terciptanya aparatur yang amanah, profesional dan berwibawa”

- b. Misi Pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuasin Dalam upaya mewujudkan visi Inspektorat Kabupaten Banyuasin, misi pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :
 1. Melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

2. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan yang amanah, profesional dan berwibawa.
4. Meningkatkan kerjasama antar aparat pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

TUJUAN	“Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) dengan meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah yang Amanah, Professional dan Berwibawa untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”
---------------	--

b. Sasaran

SASARAN	1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah
----------------	--

3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi Pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Melaksanakan pelatihan aparatur di bidang pengawasan.
3. Menerapkan norma pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan norma aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sehingga mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan baik dari pengawasan intern maupun dari pengawasan ekstern.

4. Program Utama

Program utama pembangunan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan jasa makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Jasa Teknis
- Penyusunan SOP SKPD/SKPKD

- b. Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan dinas / operasional
- Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor
- Pengadaan peralatan rumah/gedung kantor
- Pengadaan mebulair
- Pemeliharaan rutin rumah/gedung kantor



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015

- Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas operasional
 - Pemeliharaan rutin berkala peralatan kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Disiplin Pegawai
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan LAKIP Inspektorat Kab. Banyuasin
 - Reviu Laporan Keuangan Pemda
 - Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - Inventarisasi temuan pengawasan
 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
 - Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa
- g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan pokok sebagai berikut: .
- Bimtek pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
 - Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan Pemda
 - Rapat Koordinasi Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

- h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
 - Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)
 - Digitalisasi Data Hasil Pengawasan
- j. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
- Koordinasi monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inpres No 5/ 2004
 - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
 - Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di bawahnya

5. Program dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2014-2018, telah ditetapkan 10 (sepuluh) program yang akan dilaksanakan periode 2014-2018. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program, sedangkan 3 (tiga) program tidak dilaksanakan pada tahun 2014 karena sebagian kegiatan telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan ada yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi	Laporan Tahunan	
2.		Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional	Inspektur Kabupaten Banyuwangi	Laporan Tahunan	
3.		Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi	Laporan Tahunan	
4.		Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektur Kabupaten Banyuwangi	Laporan Tahunan	
5.		Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi	Laporan Tahunan	



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2018, telah dilakukan *mapping* dari misi terhadap sasaran, indikator kinerja dan program yang secara rinci disajikan dalam Rencana Strategis (RS) pada lampiran 1.

Sasaran strategis tahun 2014 ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan target indikator sebanyak 5 (lima) indikator, secara rinci dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran 2.

2.2 Perjanjian Kinerja

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29/2010 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah membuat Perjanjian kinerja tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial Penetapan Kinerja Tahun 2014 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2014. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2013 selengkapnya terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2014 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 612 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyuwangi tidak mencantumkan target yang akan dicapai pada tahun 2014 karena target capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) sasaran dan keberhasilannya masih harus ditingkatkan secara terus menerus.

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

TUJUAN	“Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good and clean governance</i>) dengan meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah yang Amanah, Professional dan Berwibawa untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”
---------------	--

Untuk mewujudkan tujuan telah ditetapkan sasaran. dalam tahun 2014 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

SASARAN	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah
----------------	--

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan rencana dan realisasi yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta capaian sampaian dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen RPJMD Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015

Tabel 3.1 Capaian Kinerja

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2014			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	%	83,00	61,07	73,58
2.	Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional	%	75,00	67,50	90,00
3.	Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	85,00	-	-
4.	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	75,00	75,36	100,48
5.	Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	%	80,00	-	-
Rata-Rata Capaian					88,02

Secara umum capaian sasaran ini telah tercapai dengan baik dengan rata-rata capaian sebesar 88,02%, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi 100%. Adapun capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan dengan persentase 61,07%. Hal ini disebabkan dari 488 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 baru 298 yang telah ditindaklanjuti, sedangkan 162 temuan masih dalam proses dan 298 temuan hasil pemeriksaan pada bulan Nopember dan Desember 2014 akan ditindaklanjuti pada tahun 2015. Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal (BPK-RI) sampai dengan tahun 2014 telah ditindaklanjuti sebanyak 519 temuan dari 575 temuan sehingga capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal sebesar 90,26%, upaya yang telah dilakukan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan Mengirimkan surat kepada SKPD terkait agar segera melakukan tindaklanjut sesuai rekomendasi yang telah disepakati.koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal.
2. Indikator Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional dengan persentase 67,50 %. Hal ini disebabkan dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil, baru 27 orang yang memiliki menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, seharusnya Inspektorat Kabupaten harus memiliki sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang Auditor. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain:
 - a. Mengikut sertakan SDM Inspektorat untuk mengikuti Diklat Fungsional Auditor di BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

- b. Mengikutsertakan SDM Inspektorat untuk mengikuti Diklat Substantif yang berkaitan dengan Pengawasan.
3. Indikator kinerja Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan telah tersedia dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 515 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang masih dapat diimplementasikan sampai sekarang.
- Dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tahun 2014, satuan target yang ditetapkan dalam bentuk persentase, namun realisinya adalah dokumen sehingga tidak dapat diperbandingkan.
4. Capaian Kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan persentase 100,48 %, hal ini dicapai dari target 75% dengan realisasi 75,36% dengan rincian:
- a. Jumlah Penanganan Pengaduan pada Tahun 2014 sebanyak 52 Pengaduan.
- b. Jumlah Pengaduan yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak 69 Pengaduan.
- Hal ini menunjukkan semua pengaduan telah ditangani dengan baik dan diterbitkan laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati Banyuwangi.
5. Pada Indikator Kinerja Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan Sistem Hasil Pengawasan (SIM-HP) dalam mengelola data hasil pengawasan.
- Dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Tahun 2014, satuan target yang ditetapkan dalam bentuk persentase, namun realisinya adalah Aplikasi sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Apabila dilihat dari perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2014 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2013 sebanyak 2 (dua) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Realisasi Kinerja (%)		Capaian Kinerja (%)	
		2013	2014	2013	2014
1.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	77,09	61,07	96,69	73,58
2.	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	74,47	75,36	85,59	100,48



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 mengalami peningkatan baik realisasi kinerja maupun capaian kinerja pada indikator Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, namun sebaliknya pada indikator kinerja Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat mengalami penurunan, hal ini disebabkan indikator kinerja bersifat unconditional.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2014 dengan Target Jangka Menengah (RPJMD)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi s.d 2014	Capaian (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/4x100</i>
1.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	%	94,00	61,07	64,97
2.	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	90,00	75,36	83,73
Rata-Rata Capaian					74,35

Jika dilihat dari tabel diatas perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja tahun 2014 jika dibandingkan dengan target jangka menengah (RPJMD) tahun 2018 akan mengalami peningkatan yang *signifikan* selama 4 (empat) tahun kedepan dengan rata-rata capaian sebesar 74,35%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 tidak perlu diperbandingkan.

3.1.3 Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian target kinerja, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi akan melakukan peningkatan kinerja agar di tahun yang akan datang mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Adapun peningkatan/penurunan kinerja yang terjadi disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Indikator Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 23,11% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013. Hal ini disebabkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

Banyuasin dan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan pada tahun 2014 baru ditindaklanjuti 61,07%.

2. Pada Indikator Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional capaian kinerja sebesar 90,00%. Hal ini disebabkan dari 44 orang Pegawai Negeri Sipil, baru 27 orang yang memiliki menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
3. Pada Indikator Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Banyuasin masih menerapkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 515 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuasin karena masih dapat diimplementasikan sampai dengan sekarang.
4. Pada Indikator Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat tingkat capaian kerjanya sebesar 100,48% . Hal ini menunjukkan semua pengaduan telah ditangani dengan baik dan diterbitkan laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati Banyuasin.
5. Pada Indikator Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Banyuasin telah menerapkan Sistem Hasil Pengawasan (SIM-HP) dalam mengelola data hasil pengawasan.

Sehingga untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin pada tahun yang akan datang maka alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengirimkan surat kepada SKPD terkait agar segera melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang telah disepakati.
2. Mengirimkan PNS untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor di BPKP Perwakilan Sumatera Selatan.
3. Mengajukan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan revisi/reviu terhadap Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2015.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015

3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4 Analisis Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Keuangan			Sumber Daya Manusia		
				Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rencana (orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH						
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.667.200.000	1.608.548.000	96,48	44	44	100%
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	275.400.000	223.825.000	81,27	10	10	100%
			Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	245.550.000	126.615.000	51,56	44	44	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional	Program Peningkatan Disiplin Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
			Pendidikan dan pelatihan formal	229.350.000	152.651.128	66,56	24	19	79,17
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	200.000.000	11.102.600	5,55	44	0	0%
3.		Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
			Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)	16.550.000	16.520.000	99,82	11	11	100%
4.		Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat						
			Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	874.800.000	666.725.000	76,21	44	44	100%
5.		Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi						
			Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	83.725.000	81.244.945	97,04	44	44	100%
			Digitalisasi Data Hasil Pengawasan	28.500.000	28.500.000	100,00	6	6	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

3.1.5 Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja

Berdasarkan pernyataan kinerja tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah berkomitmen untuk melaksanakan 8 (delapan) program dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang akan mendukung pencapaian strategis “*Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah*” yaitu:

1. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Tersedianya Aparatur Pengawasan yang Profesional, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan, pada kegiatan ini tidak dapat terealisasi 100%. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak dapat direalisasikan pelaksanaannya. Hal ini terkendala oleh padatny jadwal narasumber (BPKP) sebagai pembina SPIP.
3. Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengawasan, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
4. Berkurangnya Pengaduan Masyarakat, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Tersedianya Teknologi Informasi Pengawasan, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

- a. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)
- b. Digitalisasi Data Hasil Pengawasan

Dan untuk mendukung terlaksananya pencapaian strategis “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan*”, maka didukung dengan beberapa program yaitu:

1. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik dan berkualitas, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Penyedia jasa surat menyurat
 - b. Penyedia jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - j. Penyediaan jasa makanan dan minuman
 - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - l. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Jasa Teknis
2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana aparatur dan memelihara sarana dan prasarana yang sudah ada, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah/gedung kantor
 - c. Pengadaan Peralatan rumah/gedung kantor
 - d. Pengadaan mebulair
 - e. Pemeliharaan rutin rumah/gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin berkala mobil dinas/operasional
 - g. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

3. Meningkatnya pengetahuan dalam menyusun sistem pelaporan keuangan, pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemda
 - b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2014 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini dengan total Anggaran sebesar Rp. 8.961.901.595,48,- (*delapan milyar sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh lima koma empat puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.686.863.695,48 dan belanja Langsung sebesar Rp. 6.275.037.900,00 dengan total realisasi sebesar Rp. 8.120.621.022,00 (*delapan milyar seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu dua puluh dua rupiah*) dan daya serap keuangan sebesar 90,61%.

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada tahun 2014 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan

No.	Sasaran/ Indikator	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSE NTASE (%)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan									
1	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	%	83,00	61,07	73,58	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kdh	2.188.150.000,00	1.958.988.000,00	89,53
2	Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional	%	75,00	67,50	90,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	429.350.000,00	163.753.728,00	38,14
3	Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	%	85,00	90,91	106,95	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	16.550.000,00	16.520.000,00	99,82
4	Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	%	75,00	75,36	100,48	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	112.225.000,00	109.744.945,00	97,79
5	Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	80,00	100	125,00	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	874.800.000,00	666.725.000,00	76,21
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan									
6	Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik dan berkualitas	Bulan	12	12	100,00	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.279.425.900,00	1.233.149.550,00	96,38
7	Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana aparatur	Bulan	12	12	100,00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.237.687.000,00	1.169.100.932,00	94,46
7	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Laporan	2	2	100,00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	136.850.000,00	128.932.500,00	94,21
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					99,50	Rata-Rata Capaian Realisasi Anggaran			85,82



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2015

Jika dilihat dari tabel di atas sasaran-sasaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 99,50% jika dibandingkan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 85,82% sehingga dapat dilihat adanya penghematan penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Adapun sasaran-sasaran yang telah dan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan jika capaian kinerja sebesar 73,58% sedangkan realisasi anggaran sebesar 89,53% sehingga masih terjadi kurangnya efisiensi anggaran.
2. Pada capaian Indikator Ketersediaan Aparatur Pengawasan yang Profesional Capaian kinerja sebesar 90,00% sedangkan realisasi anggaran sebesar 34,14% sehingga terjadi efisiensi anggaran.
3. Pada capaian Indikator Ketersediaan Sistem dan Prosedur Pengawasan sebesar 106,95% sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,82% sehingga terjadi efisiensi anggaran.
4. Pada capaian Indikator Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat sebesar 100,48% sedangkan realisasi anggaran sebesar 97,79% sehingga terjadi efisiensi anggaran.
5. Pada capaian Indikator Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan sebesar 125% sedangkan realisasi anggaran sebesar 76,21% sehingga terjadi efisiensi anggaran
6. Pada capaian Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik dan berkualitas sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 96,38% sehingga terjadi efisiensi anggaran.
7. Pada capaian Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,46% sehingga terjadi efisiensi anggaran.
8. Pada capaian Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,21% sehingga terjadi efisiensi anggaran.

3.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 mendapat nilai A atau dengan predikat **SANGAT BAIK**. Rekomendasi yang



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

diberikan kepada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi beserta seluruh jajarannya yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- b. IKU telah dimanfaatkan dalam penyusunan Renja, RKA/DPA; dimanfaatkan untuk penilaian kinerja; dan telah direviu secara berkala.
- c. Pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- d. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan dan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
- e. Evaluasi program telah dilakuakn oleh SDM yang berkompetensi dan disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler.
- f. Hasil evaluasi telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menindaklanjuti INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Banyuasin yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 10 (sepuluh) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Sekretariat dan Inspektur Pembantu di jajaran Inspektorat Kabupaten Banyuasin sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 1 (satu) tujuan dari 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator pencapaian kinerja sasaran dan 8 (delapan) program adalah sebagai berikut:

- 1) Keberhasilan di atas 100% belum diperoleh dari jumlah indikator kinerja sasaran yang ada.
- 2) Keberhasilan 75%o sampai dengan 100% sebanyak 3 (tiga) indikator atau 100% dari jumlah indikator kinerja sasaran.
- 3) Seluruh indikator kinerja sasaran dapat dicapai karena telah di dukung oleh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara baik meskipun masih membutuhkan peningkatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran pada Inspektorat Kabupaten Banyuasin untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2014, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyuasin mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuasin.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
INSPEKTORAT KABUPATEN
TAHUN 2015**

- 2) Rencana Strategis (RENSTRA) dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perencanaan lainnya.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Banyuasin ini, masih dirasakan belum pada tahap sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2014 untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

MATRIK RENSTRA

KABUPATEN : BANYUASIN
SKPD : INSPEKTORAT
PERIODE : 2014 - 2018
VISI : "Terciptanya aparatur yang amanah, profesional dan berwibawa"
MISI : 1. Melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin
 2. Mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
 3. Meningkatkan kualitas aparat pengawasan yang amanah, profesional dan berwibawa
 4. Meningkatkan kerjasama antar aparat pengawasan dalam rangka mendorong pencegahan dan penanggulangan praktek KKN

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja per Tahun					Program/Kegiatan	
				Satuan	2014	2015	2016	2017		2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) dengan meningkatkan kemampuan Pemerintahan Daerah yang Amanah, Professional dan Berwibawa untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%	83%	85%	87%	90	94%	94%	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		ketersediaan aparatur pengawasan yang profesional	%	75%	80%	85%	90%	95%	95%	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	%	85%	85%	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN Penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)
		Ketersediaan data hasil pengawasan	%	80%	83%	85%	87%	90%	90%	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan Digitalisasi Data Hasil Pemeriksaan
		tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75%	77%	80%	85%	90%	90%	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pangkalan Balai, Februari 2014

INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak.,CA
 PEMBINA TK. I

NIP. 19651023 198703 1 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2014**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	85%
	Ketersediaan aparatur pengawasan yang profesional	80%
	Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	85%
	Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	83%
	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	77%

Pangkalan Balai, Februari 2014
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak.,CA
PEMBINA TK. I
NIP. 19651023 198703 1 001

**PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KABUPATEN
SKPD**

**: BANYUASIN
: INSPEKTORAT**

NO.	SASARAN					REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN	SATUAN	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan/total temuan pengawasan x 100%	%	83.00	61.07	73.58
2.		ketersediaan aparatur pengawasan yang profesional	Jumlah aparat pengawasan yang profesional/jumlah total aparat pengawasan yang harus ada x100%	%	75.00	67.50	90.00
3.		ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah sistem dan prosedur pengawasan/jumlah sistem dan prosesur pengawasan yang harus ada	%	85.00	90.91	106.95
4.		Ketersediaan Teknologi Informasi Pengawasan	jumlah data hasil pengawasan yang ada/jumlah data hasil pengawasan yang harus ada x 100%	%	80.00	100.00	125.00
5.		tingkat penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditangani/jumlah total pengaduan yang masuk x 100%	%	75.00	75.36	100.48

Pangkalan Balai, Februari 2014
INSPEKTUR KABUPATEN BANYUASIN,

SUBAGIO, Ak.,CA
PEMBINA TK. I
NIP. 19651023 198703 1 001